

## **PENGUATAN KARAKTER SEMANGAT KEBANGSAAN MELALUI PEMBELAJARAN KEARIFAN LOKAL DALAM MATAKULIAH PPKn\***

### ***STRENGTHENING THE CHARACTER OF THE NATIONAL SPIRIT THROUGH LEARNING LOCAL WISDOM IN PPKn COURSES***

**Hasbi Ali**

<sup>1</sup> Prodi PPKn FKIP Unsyiah, Aceh, Indonesia

E-mail: asbysagita@yahoo.co.id

Diterima: 23/10/2018; Revisi: 21/11/2018; Disetujui: 29/11/2018

#### **ABSTRAK**

Karakter semangat kebangsaan terwejantahkan dalam sikap bela negara yang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya membentuk karakter bangsa Indonesia yang mulai mengalami degradasi. Bela negara tidak hanya dalam bentuk perjuangan fisik, akan tetapi juga non fisik. Bela negara tidak hanya menjadi tanggungjawab salah satu pihak atau golongan semata, akan tetapi menjadi hak dan kewajiban semua anak bangsa sebagai upaya menjaga kebhinnekatunggalikaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud bela negara non fisik adalah upaya pelestarian budaya kearifan lokal yang pernah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Upaya melestarikan budaya kearifan lokal ini merupakan salah satu strategi yang dipandang cukup ampuh dalam rangka pembentukan karakter bangsa Indonesia. Hari ini, seakan- akan ke-Indonnesiaan kita mulai digugat kembali dan cenderung terpecah-belah. Namun demikian, kita tidak boleh berputus asa dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara ini.

**Kata Kunci:** Karakter semangat kebangsaan, kearifan lokal

#### **ABSTRACT**

*The character of the national spirit is manifested in the state's defense attitude which is a necessity in an effort to shape the character of the Indonesian nation which began to experience degradation. State defense is not only in the form of physical struggle, but also non-physical. State defense is not only the responsibility of one party or class, but becomes the rights and obligations of all the nation's children as an effort to maintain unity in the frame of the Unitary Republic of Indonesia. One form of defense for non-physical countries is an effort to preserve the culture of local wisdom that has grown and developed in Indonesian society for a long time. Efforts to preserve the culture of local wisdom is one of the strategies that are considered effective enough in the context of the formation of the Indonesian nation's character that has now been degraded. Today, it seems as if Indonesia has begun to be sued again and tends to be torn apart. However, we must not despair in maintaining the integrity of this nation and country. In*

---

\* Ucapan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Belmawa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Program *General Education* Universitas Syiah Kuala 2018 yang telah mendukung dan membiayai penerbitan artikel ini.

*this case, all parties need to continue to knit Indonesia back so that this nation does not disappear from its cultural roots.*

**Keywords:** *Nationality Character Spirit, Local wisdom*

## PENDAHULUAN

Upaya bela negara tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia semata, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (3) dan 30 ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam hal ini, upaya bela negara tidak hanya dalam wujud perlawanan fisik semata, termasuk juga non fisik sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Salah satu bentuk upaya bela negara non fisik tersebut adalah pelestarian budaya kearifan lokal yang pernah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Budaya kearifan lokal sarat dengan nilai- nilai yang sangat diperlukan dalam memperkuat paham kebangsaan yang saat ini sedang mengalami degradasi, terutama pada generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet perjuangan bangsa di masa depan. Upaya pelestarian budaya bangsa ini sangat diperlukan karena merupakan salah satu bentuk kekayaan bangsa yang perlu dijaga dan diinternalisasikan, sehingga tidak punah.

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini sedang giat- giatnya mensosialisasikan tentang pendidikan karakter, budi pekerti, dan revolusi mental yang ditipkan kepada setiap

instansi dan profesi. Kebijakan ini sudah sangat tepat mulai dilakukan karena hari ini kita tidak hanya perlu menumbuhkembangkan patriotisme, nasionalisme, dan wawasan kebangsaan; justeru sangat mendesak harus dilakukan saat ini adalah pembentukan karakter bangsa. Karakter dasar bangsa Indonesia yang religius, ramah, jujur, dan integralistik sebagai cerminan dari nilai- nilai falsafah bangsa Indonesia Pancasila. Kesemua karakter dasar bangsa Indonesia sebagai cerminan dari budaya bangsanya tersebut hari ini telah mengalami degradasi dan digugat oleh masyarakat pendukungnya sendiri. Kondisi bangsa Indonesia yang ditunjukkan hari ini telah sejak lama menjadi kegalauan dari semua pihak seperti Ismail Marzuki dengan *Ibu Pertiwi Menangisnya*, Frengky Sahilatua dengan *Perahu Retaknya*, dan Edo Kondolangit dengan *Aku Papuanya*. Hari ini keindonesiaan kita sepertinya telah tercabik- cabik, sehingga untuk mempertahankannya persatuan dan kesatuan bangsa ini perlu terus dirajut kembali

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1) Hakekat Bela Negara

Upaya bela negara tidak semata- mata menjadi tanggungjawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia (POLRI) sebagai konstantta negara, akan tetapi turut melibatkan semua warga negara sesuai dengan sistem bela negara Indonesia Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA). Menurut Sunarso (2008:42) bahwa: “Bela negara mengandung empat hal esensial yang harus dibela, yaitu kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah yuridiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila dan UUDRI 1945”. Upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat (3) dan 30 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara”.

Dalam dunia pendidikan, upaya bela negara dilaksanakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Dimana, diharapkan setiap peserta didik memiliki jiwa nasionalisme dan sikap patriotisme di dalam dirinya. Selain itu, upaya bela negara juga dapat dilakukan melalui Rakyat Terlatih (RATIH) seperti pada unit- unit kegiatan peserta didik baik pada tingkat dasar mapun mahasiswa. Menurut Yusgiantoro (2010:39) bahwa:

“Membela bangsa dan negara bisa ditumbuhkan melalui Pembinaan Kesadaran

Bela Negara (PKBN) karena bela negara merupakan sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan sikap bela negara bisa melalui suatu bentuk pelatihan yang berkala dan terus menerus agar dapat berhasil secara maksimal.”

Dalam hal ini, perlu disadari bahwa upaya bela negara sangat memerlukan dukungan dari warga negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 30 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Hakekat bela negara dalam konteks pembentukan karakter bangsa secara umum dapat dimaknai sebagai: Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai semangat rasa cinta tanah air berdasarkan ideologi dan konstitusi negara dalam upaya mempertahankan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara”. Sikap dan perilaku warga negara yang demikian jelas terlihat dari butir Sila Ketiga Pancasila bahwa:

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara

sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketujuh butir ini diterjemahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai:

1. Negara kebangsaan Indonesia milik seluruh rakyat secara keseluruhan.
2. Persatuan Indonesia berdasarkan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia senasib sepenanggungan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Persatuan Indonesia merupakan sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia.
4. Kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit dan berlebihan (*chauvinisme*), melainkan kebangsaan yang

menghormati eksistensi bangsa- bangsa lain.

## 2) Pembentukan Karakter Bangsa

Pembentukan karakter bangsa merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari lagi dalam rangka mencapai dan mendukung pencapaian cita dan tujuan nasional Indonesia sebagaimana termaaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sebagaimana diamanatkan bahwa: Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa (Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025).

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN), sesungguhnya pembentukan karakter ini sudah tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi: (1) Mengembangkan potensi bangsa agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, (2) Membangun bangsa yang berkarakter Pancasila, dan (3) Mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia (Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025).

Pendidikan karakter berfungsi (1) Membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural, (2) Membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan ummat manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik, dan (3) Membangun sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup

berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni (Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025).

Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yaitu keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Satuan pendidikan sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai pembentuk karakter melalui program operasional satuan pendidikan masing-masing. Hal ini merupakan prakondisi pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang untuk selanjutnya diperkuat dengan 18 nilai karakter hasil kajian empirik Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nilai prakondisi yang dimaksud seperti: keagamaan, gotong royong, kebersihan, kedisiplinan, kebersamaan, peduli lingkungan, kerja keras, dan sebagainya.

Karakter dimaknai sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terwejantahkan dalam perilaku (Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025). Karakter terbentuk dari pengetahuan seseorang, sehingga dapat berperilaku sesuai dengan pengetahuannya tersebut. Selanjutnya, Megawangi (2004:25) mengatakan bahwa: "Kata karakter berasal dari bahasa Yunani *charassein* yang berarti mengukir, sehingga

terbentuk sebuah pola”. Pola dalam pengertian tersebut dimaksudkan adalah suatu proses yang terjadi dalam rangka upaya membentuk akhlak mulia pada diri peserta didik.

Oleh karena itu, Munir (2010:3) mendefinisikan karakter sebagai: “Sebuah pola baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan yang melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan”. Dalam hal ini, Budimansyah (2010:1) menjelaskan lebih lanjut bahwa: “Inti karakter adalah kebajikan (*goodness*) dalam arti berpikir baik (*good thinking*), berperasaan baik (*good filling*), dan berperilaku baik (*good behaving*)”. Ditambahkan Megawangi (2004:25) bahwa: “Akhlak mulia tidak secara otomatis dimiliki oleh setiap manusia begitu ia dilahirkan, akan tetapi memerlukan proses panjang melalui pengasuhan dan pendidikan (proses pengukiran). Dari beberapa pendapat tersebut, di sinilah peran guru sebagai pendidik sangat vital dalam membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan karakter bangsa.

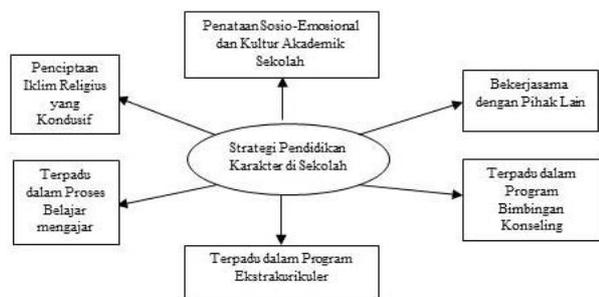
Pembentukan karakter bangsa merupakan suatu bentuk transformasi nilai- nilai kebaikan agar mereka memiliki kepribadian Pancasila. Gaffar dalam Kesuma (2011:5) mendefinisikan karakter sebagai: “Sebuah proses tranformasi nilai- nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang, sehingga menjadi salah satu dari bentuk perilakunya”. Dengan demikian, diharapkan akan terciptanya peserta didik yang

berkepribadian stabil sebagaimana dikatakan oleh Prayitno dan Manullang (2010:38) bahwa: Karakter adalah sifat pribadi yang lebih stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi”.

Dalam hal ini, Sumantri (2011:3) mendefinisikan karakter sebagai: “Watak, tabiat, akhlak, dan kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*)”. Dari definisi tersebut, karakter bangsa yang harus dibentuk tidak terlepas dari nilai- nilai luhur Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia sebagaimana yang telah dirincinakan dalam Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025, yaitu:

- (1) Karakter yang bersumber dari olah hati antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggungjawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik.
- (2) Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, dan reflektif.
- (3) Karakter yang bersumber dari olah raga/kinestika antara lain bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih.
- (4) Karakter yang berasal dari olah rasa dan karsa antara lain kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patriotik), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, bekerja keras, dan beretos kerja.

Oleh karena itu, pengembangan karakter peserta didik oleh guru di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan strategi berikut:



(Sumber: Yusuf dan Sugandhi, 2011:36)

Gambar di atas, dapat di jelaskan, pertama, menciptakan iklim religius yang kondusif dimaksudkan adalah seluruh komponen masyarakat sekolah harus memiliki komitmen yang senada untuk mengejewantahkan nilai-nilai agama dalam setiap proses pembelajaran di sekolah.

Kedua, penataan sosio-emosional dan kultur akademik sekolah dimaksudkan adalah agar sekolah dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosional serta mampu membangun budaya akademik pada peserta didik.

Ke tiga, kerjasama dengan pihak lain dimaksudkan dalam rangka upaya membentuk karakter peserta didik, sekolah diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun non pemerintah.

Ke empat, terpadu dalam program bimbingan dan konseling dimaksudkan agar pihak sekolah dapat mengintegrasikan pembentukan karakter peserta didik dalam pelaksanaan konseling.

Ke lima, terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan ada beberapa nilai- nilai karakter yang dapat ditanamkan kepada peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Ke enam, terpadu dalam proses belajar mengajar dimaksudkan pembentukan karakter peserta didik tidak harus menjadi mata pelajaran tersendiri dengan kurikulum tersendiri juga, akan tetapi setiap guru dituntut untuk dapat menanamkan nilai- nilai karakter kepada peserta didik dalam setiap proses belajar mengajar lintas bidang ilmu.

### 3). Pelestarian Budaya Kearifan Lokal

Pada hakikatnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai- nilai budaya merupakan manifestasi dan legitimasi masyarakat terhadap budaya. Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Bentuk simbolis yang berupa bahasa, benda, musik, kepercayaan, serta aktivitas- aktivitas masyarakat yang mengandung makna kebersamaan merupakan cakupan budaya. Dalam hal ini, Kluchohn dan Kelly dalam Niode (2007:49) berpendapat bahwa: “Kebudayaan adalah pola untuk hidup yang tercipta dalam sejarah yang eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan non rasional yang terdapat pada

setiap waktu sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia”.

Kearifan lokal menurut Wales dalam Rosidi (2011:29) dimaknai sebagai: “Kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Hal ini penting terutama di zaman sekarang ini, yakni zaman keterbukaan informasi dan komunikasi yang jika tidak disikapi dengan baik maka akan berakibat pada hilangnya kearifan lokal sebagai identitas dan jati diri bangsa. Hal yang sama disampaikan oleh Lubis (2008:40) bahwa: “Identitas etnis adalah watak kebudayaan (*cultural character*)”.

Dilihat dari struktur dan tingkatannya kearifan lokal berada pada tingkat *culture*. Hal ini berdasarkan sebuah skema sosial budaya yang ada di Indonesia, dimana terdiri dari masyarakat yang bersifat majemuk dalam struktur sosial, budaya (*multikultural*) maupun ekonomi. Ranjabar dalam Machfiroh (2011:16) mengatakan bahwa dilihat dari sifat majemuk masyarakat Indonesia, maka harus diterima bahwa adanya tiga golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai coraknya sendiri, yaitu: (1) Kebudayaan suku bangsa (*etnis culture*), (2) Kebudayaan umum lokal (kebudayaan daerah), dan (3) Kebudayaan nasional.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat (2009:89) budaya lokal terkait dengan istilah suku bangsa sendiri adalah:

“Suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, dalam hal ini unsur bahasa adalah ciri khasnya”. Terkait dengan budaya lokal sebagai kearifan lokal, Judistira (2008:141) mengatakan bahwa kearifan lokal adalah: “Merupakan bagian dari sebuah skema dari tingkatan budaya. Kebudayaan lokal adalah melingkupi kebudayaan regional dan kebudayaan regional adalah bagian-bagian yang hakiki dalam bentukan kebudayaan nasional.

Dalam pengertian yang luas, Judistira (2008:113) mengatakan bahwa: “Kebudayaan daerah bukan hanya terungkap dari bentuk dan pernyataan rasa keindahan melalui kesenian belaka, akan tetapi termasuk segala bentuk dan cara-cara berperilaku, bertindak, serta pola-pola pikiran yang berada jauh di belakang apa yang tampak tersebut”. Oleh karena itu, wilayah administratif tertentu, dapat menjadi wilayah budaya daerah atau wilayah budaya daerah itu meliputi beberapa administratif, ataupun di suatu wilayah administratif akan terdiri dari bagian-bagian suatu budaya daerah.

Wilayah administratif secara geografis pada dasarnya menjadi batasan dari budaya lokal dalam defenisinya. Dalam pengertian budaya lokal atau daerah yang ditinjau dari faktor demografi dengan polemik di dalamnya, Kuntowijoyo (2006:42) memandang bahwa: “Wilayah administratif antara antara desa dan kota menjadi kajian tersendiri, dimana kota

yang umumnya menjadi pusat dari bercampurnya berbagai kelompok masyarakat baik lokal maupun pendatang menjadi lokasi yang sulit didefinisikan. Sedangkan di wilayah desa, sangat memungkinkan untuk dilakukan pengidentifikasian”. Hal ini menunjukkan bahwa di kota dan lapisan atas masyarakat sudah ada kebudayaan nasional, sedangkan kebudayaan daerah dan tradisional menjadi semakin kuat bila semakin jauh dari pusat kota.

Hal ini sesuai yang dikatakan Abdullah (2006:84) bahwa: “Keberadaan suatu etnis di suatu tempat memiliki sejarahnya secara tersendiri, khususnya menyangkut status yang dimiliki suatu etnis dalam hubungannya dengan etnis lain. Sebagai suatu etnis yang merupakan kelompok etnis pendatang dan berinteraksi dengan etnis asal yang terdapat di suatu tempat, maka secara alami akan menempatkan pendatang pada posisi yang relatif lemah”.

Sudah sejak lama kearifan lokal sudah dikenal oleh masyarakat dan merupakan dasar dalam melakukan aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kearifan lokal agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan identitas atau jati diri lokal, maka harus memperhatikan dan mempertahankan sistem- sistem sosial yang ditransformasikan kepada generasi muda. Oleh karena itu, dituntut integritas masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman

tanpa mengabaikan nilai- nilai kearifan lokal sebagai kekuatan identitas bangsa.

Budaya merupakan konsep yang sangat luas dan kompleks yang dapat diinterpretasikan secara beragam. Selain budaya universal dikenal pula budaya lokal yang menyimpan kearifan lokal. Sementara kearifan lokal yang kesemuanya merupakan sebuah kompleksitas budaya. Cerita rakyat dapat dikatakan menyimpan sejumlah informasi sistem budaya seperti filosofi, nilai, norma, perilaku masyarakat.

Cerita rakyat yang pada mulanya dilisankan selain berfungsi untuk menghibur, juga dapat memberikan pendidikan nilai. Namun demikian, cerita rakyat sekarang sudah digeser oleh macam bentuk hiburan yang lebih menarik dalam berbagai jenis siaran melalui televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. padahal, sebelum media cetak dan media elektronik berkembang pesat seperti sekarang ini, cerita rakyat mendapat tempat yang baik di hati masyarakat pemiliknya. Cerita rakyat merupakan pencerminan dari kehidupan masyarakat pada saat itu, pola pikir dan hayalan yang menarik, sehingga masyarakat merasa tertarik dan memperoleh keteladanan.

Secara garis besar, menurut Nurgiyantoro (2000:324) persoalan hidup dan kehidupan manusia itu dapat dibedakan ke dalam persoalan: (1) Hubungan manusia dengan diri sendiri, (2) Hubungan manusia dengan manusia

lain dalam lingkup sosial, termasuk hubungannya dengan lingkungan alam sekitarnya, dan (3) Hubungan manusia dengan Tuhannya. Perubahan yang dilakukan manusia terutama melalui proses pengenalan kebudayaan yang terus menerus akan dapat diidentifikasi pemahaman manusia kepada kebudayaannya.

## SIMPULAN

Karakter semangat kebangsaan terwejantahkan dalam wujud bela negara yang tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) semata, melainkan merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Upaya bela negara juga tidak hanya dalam wujud perlawanan fisik semata, melainkan non fisik sesuai dengan situasi dan kondisi atau ancaman yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025. Jakarta: Depdikbud.
- Budimansyah, Dasim. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Judistira, K.G. 2008. *Budaya Sunda: Melintasi Waktu Menentang Masa Depan*. Bandung: Lemlit UNPAD.
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat (Edisi Paripurna)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kesuma, Dharma, Cipi Triatna, dan Johar Permana. 2011. *Pendidikan Karakter (Kajian Teori dan Praktik di Sekolah)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. 2009. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.

Pembentukan karakter bangsa saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat urgen untuk segera dilakukan oleh semua pihak karena telah mengalami degradasi, terutama pada generasi muda yang seakan- akan telah tercerabut dari akar budayanya. Kita harus merajut kembali keindonesiaan yang terkoyak untuk tetap mempertahankan keutuhan bangsa dan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu upaya membangun karakter bangsa (*national and character building*) adalah dengan pembelajaran budaya kearifan lokal (*local genius*) yang sarat dengan nilai- nilai sebagai salah satu wujud bela negara non fisik, terutama kepada generasi muda.

- Lubis, B.Z. 2008. *Potensi Budaya dan Kearifan Lokal Sebagai Modal Dasar Membangun Jati Diri Bangsa*. Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial. “vol” 9, (3), 339-346.
- Machfiroh, R. 2011. *Revitalisasi Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pengembangan Budaya lokal (Studi Kasus Budaya Macapat di Masyarakat Kota Surakarta Jawa Tengah)*. Tesis Magister pada SPS UPI Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Megawangi, Ratna. 2004. *Pendidikan Karakter (Solusi yang tepat untuk membangun bangsa)*. Jakarta: BP-MIGAS.
- Munir, Abdullah. 2010. *Pendidikan Karakter (Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah)*. Yogyakarta: Pedagogis.
- Nurdiyantoro, Burhan. 2000. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Presss.
- Prayitno dan Belferik Manullang (Ed). 2010. *Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*. Medan: PPs UNIMED.
- Rosidi, A. (2011). *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Sumantri, Nu'man. 2011. *Pendidikan Budaya dan Karakter suatu Keniscayaan bagi Kesatuan dan Persatuan Bangsa*. Dalam Pendidikan Karakter: Nilai Inti bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa. Bandung: Laboratorium PPKn UPI.
- Sunarso. Anis K. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Yusgiantoro, Purnomo. 2010. *Pencapaian Pembangunan Pertahanan dan Keamanan setelah 65 Tahun Indonesia Merdeka*. Jurnal Sekretariat Negara Republik Indonesia “Negarawan” Nomor 17. Edisi Agustus 2010.
- Yusuf, Syamsu dan Nani Sugandhi, 2011. *Pengembangan Peserta Didik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*